

EKSISTENSI CIVICS SEBAGAI FONDASI AWAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Fitri Hariani Harahap¹, Hendra Rahayu², Melva Adelia Manurung³, Paskaria
Simbolon⁴, Reh Bungana Beru Perangin-Angin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Medan,
Indonesia

e-mail : fitriharianiharahap@gmail.com, hendrapd44@guru.sd.belajar.id,
melvamanurung1206@gmail.com, paskaria.simbolon77@gmail.com,
rehbungana@gmail.com.

ABSTRACT

The existence of Civics as the initial foundation of Citizenship Education (PKN) in Indonesia has played a crucial role in shaping character and national awareness since the early days of independence. Civics became the forerunner to the birth of PKN, which aims to instill moral values, nationalism, and civic responsibility in a democratic state life. This study aims to describe the history of Civics as the first generation of PKN in Indonesia and analyze the basic values of Civics that are still relevant and embedded in current civic education. This study uses a descriptive qualitative method with research subjects consisting of PPKn teachers, BK teachers, and students. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis included the stages of data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. Data validity was tested using credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The results of the study indicate that Civics has a significant contribution to the development of civic values in Indonesia, especially religious values, morals, justice, responsibility, democracy, and tolerance, which are the basis for the formation of citizens with character and a nationalist spirit.

Keywords: Civics, Values, Citizenship Education, National Character

ABSTRAK

Eksistensi Civics sebagai fondasi awal Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa sejak masa awal kemerdekaan. Civics menjadi cikal bakal lahirnya PKN yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bernegara yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah Civics sebagai generasi pertama PKN di Indonesia serta menganalisis nilai-nilai dasar Civics yang masih relevan dan tertanam dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian terdiri atas guru PPKn, guru BK, dan siswa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data mencakup tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Civics* memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan di Indonesia, terutama nilai religius, moral, keadilan, tanggung jawab, demokrasi, dan toleransi yang menjadi dasar pembentukan warga negara yang berkarakter dan berjiwa nasionalis.

Kata Kunci: *Civics*, Nilai, Pendidikan kewarganegaraan, Karakter bangsa

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang berkarakter, berjiwa nasionalis, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu fondasi awal dari sebuah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah keberadaan *civics* sebagai bentuk awal pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik kepada peserta didik sejak dini. Secara historis, *civics* diadopsi dari model pendidikan kewarganegaraan Barat yang menekankan pada pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun, dalam konteks Indonesia, *civics* dikembangkan dengan nuansa khas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat kebangsaan yang

berakar pada budaya bangsa. Dalam perkembangan kurikulum nasional, peran *civics* telah bergeser menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tetapi esensinya sebagai wahana pembentukan karakter warga negara tetap menjadi hal yang mendasar dan tidak tergantikan.

Namun dalam implementasi di lapangan, esensi *civics* sebagai fondasi awal dari sebuah pendidikan kewarganegaraan mulai mengalami tantangan. Fenomena rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial menjadi indikator bahwa *civics* memang belum sepenuhnya dapat berfungsi secara optimal sebagai basic penguatan karakter kebangsaan. Adapun hasil survei yang dirilis dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2024)

menunjukkan bahwa hanya 28,6 % siswa yang memahami Pancasila melalui proses pembelajaran formal di dalam kelas, sedangkan sisanya lebih mengenal nilai-nilai kebangsaan melalui media sosial dan lingkungan nonformal. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana *civics* masih eksis dan berperan sebagai fondasi awal pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk identitas dan karakter warga negara Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dari perspektif teoritis, eksistensi *civics* dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat berkaitan erat dengan pendekatan proses pembelajaran berbasis nilai dan pengalaman, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Dewey bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep normatif, tetapi harus memberikan pengalaman langsung yang dapat menumbuhkan kesadaran demokratis dan tanggung jawab sosial. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Suyato (2024) yang menegaskan pengembangan

kurikulum *civics* di era global harus bersifat reflektif, kontekstual, dan berorientasi pada pengalaman nyata siswa agar mereka dapat memahami makna kewarganegaraan secara mendalam. Namun, realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran PKn di sekolah masih didominasi oleh pendekatan kognitif yang menekankan hafalan terhadap konsep-konsep kenegaraan, bukan pada penghayatan nilai dan praktik kewarganegaraan. Akibatnya, peserta didik lebih memahami konsep kewarganegaraan itu hanya sebagai pengetahuan formal, bukan sebagai identitas yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan ini menjadi titik tolak penelitian kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam fenomena eksistensi *civics* di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada pemahaman makna, konteks, dan pengalaman subjektif yang tidak dapat diukur dengan angka semata. Melalui pendekatan ini, akan disdeskripsikan bagaimana seorang guru, siswa, dan lingkungan pendidikan memaknai *civics* sebagai fondasi pembelajaran

kewarganegaraan; bagaimana nilai-nilai kebangsaan ditransmisikan di sekolah; serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif deskriptif ini dapat memberikan gambaran realitas empiris secara utuh tentang bagaimana *civics* dijalankan dan diterima di konteks pendidikan Indonesia yang kontemporer. Seperti dikemukakan Mustika dan Tetep (2024), persepsi dan pengalaman peserta didik terhadap pembelajaran kewarganegaraan yang akan menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan proses internalisasi nilai-nilai *civic virtue* dalam pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman bagaimana posisi dan eksistensi *civics* sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia. Sehingga dapat dilihat bahwa proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai mata pelajaran normatif, tetapi sebagai proses kultural dan sosial yang dapat membentuk identitas kebangsaan siswa. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam tentang

bagaimana *civics* masih relevan dan signifikan dalam membangun karakter warga negara yang cerdas, kritis, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan demokrasi Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono (Hendra & Hajri, 2023), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, dimana peneliti menjadi instrumen kunci yang meneliti kondisi objek alamiah dengan tujuan memperoleh makna yang mendalam, bukan generalisasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya tanpa ada membandingkan atau menghubungkan variabel (Usmi & Puspitaningrum, 2022).

Subjek penelitian terdiri atas guru PPKn, guru BK, dan siswa yang dipilih secara purposive karena dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap observasi,

wawancara, dan tahap dokumentasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran dan sikap kewarganegaraan siswa. Tahap wawancara dilakukan secara mendalam dengan guru dan siswa guna memperoleh pandangan mereka tentang bagaimana eksistensi *civics* dalam pembelajaran PKn. Sementara untuk dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti perangkat pembelajaran, foto-foto kegiatan, serta arsip sekolah.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2018) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu memeriksa data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu seperti wawancara, observasi, dan tahap dokumentasi (Sugiyono dalam Prayogi, dkk., 2023). Prosedur ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian agar temuan yang diperoleh dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Civics sebagai fondasi awal Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan peran fundamental dalam pembentukan identitas nasional. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan guru PPKn, guru BK, serta siswa, ditemukan bahwa Civics tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengajarkan konsep kewarganegaraan, tetapi juga menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika sosial, dan tanggung jawab kebangsaan sejak dini. Dalam konteks pendidikan nasional, keberadaan Civics telah menjadi pilar utama dalam membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan berkeadaban.

Secara historis, konsep *Civics* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan tujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Gagasan tersebut kemudian diadaptasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia, dan menjadi cikal bakal Pendidikan Kewarganegaraan (Somantri dalam Ubaedillah, 2015,

hlm. 13). Di Indonesia, Civics mulai diterapkan sejak tahun 1957 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran nasional dan membangun karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Menurut pendapat Nanggala dan Damayanti (2023, hlm. 469), *Civics* secara etimologis berasal dari kata Latin *civis*, *civicus*, atau *civitas* yang berarti warga negara, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai ilmu yang membahas hubungan antara individu dengan negara serta peran warga negara dalam masyarakat politik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan yang berakar dari konsep Civics di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tentang negara, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan implementasi di sekolah, guru PPKn dan guru BK berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Civics melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, diskusi sosial, dan refleksi nilai kebangsaan. Nilai-nilai yang diinternalisasikan

meliputi keadilan, toleransi, gotong royong, serta tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari dimensi nilai kewarganegaraan (*civic values*). Menurut Nurdiansyah dan Dhita (2024), nilai-nilai kewarganegaraan mencakup nilai kepercayaan diri, komitmen terhadap nilai-nilai religius dan moral, serta sikap demokratis dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) juga mendapat perhatian penting dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik diajak memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, sistem hukum, hak asasi manusia, dan identitas nasional. Sejalan dengan pendapat Sihombing dan Lukitoyo (2021), dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mencakup kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, kemampuan memecahkan masalah masyarakat, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara bijak. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan Civics tidak sekadar bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil dokumentasi kurikulum dan wawancara, ditemukan bahwa Civics juga berperan strategis dalam memperkuat integrasi sosial di tengah keragaman Indonesia. Melalui pembelajaran berbasis nilai-nilai Pancasila, peserta didik diarahkan untuk memahami dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Hal ini sejalan dengan Buka (2022) yang menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan mencakup hubungan publik antara individu dan negara yang diatur oleh hukum dan nilai kemanusiaan untuk mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, Civics dapat berperan dalam menginternalisasi semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan bangsa.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Widiatmaka (2023) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki ruang lingkup yang luas dan dinamis sesuai perkembangan masyarakat. Meskipun kurikulum mengalami perubahan dari masa ke masa, nilai-nilai dasar Civics tetap relevan sebagai fondasi moral dan ideologis dalam membentuk warga negara yang baik. Selain itu, SW (2020) menegaskan bahwa sejak

awal, Civics di Indonesia berfungsi untuk menyatukan perbedaan identitas sosial bangsa melalui nilai-nilai luhur Pancasila yang mengajarkan nilai kebersamaan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Civics di Indonesia tidak hanya bernilai historis tetapi juga fungsional dalam konteks pendidikan modern. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa *Civics* tetap menjadi fondasi utama Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan untuk menumbuhkan karakter kebangsaan, memperkuat kesadaran demokrasi, dan memelihara kohesi sosial di tengah tantangan globalisasi.

2. Pembahasan

Eksistensi *Civics* di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan erat kaitannya dengan dinamika sosial-politik bangsa. Pada awal kemerdekaan, *Civics* menjadi mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan moral, karakter, dan kesadaran dalam berbangsa. Pendidikan *Civics* pada masa itu

diarahkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial melalui pengajaran nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta sejarah perjuangan bangsa (Prasetyo & Kurniawan, 2020:45). Pendidikan kewarganegaraan yang berawal dari *Civics* merupakan instrumen utama untuk membangun warga negara yang memiliki kecerdasan sosial, politik, dan moral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Perubahan istilah dari *Civics* menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), kemudian Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan akhirnya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) hal ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma dan orientasi dalam membentuk warga negara yang baik. Menurut Hidayat dan Suwandi (2021: 88), transformasi tersebut merupakan refleksi dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan proses pendidikan kewarganegaraan dengan kondisi sosial-politik yang terus berubah, sekaligus memperkuat karakter nasional berbasis nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, *Civics* dapat dipandang sebagai fondasi awal yang memberi arah dan kerangka filosofis

bagi pendidikan kewarganegaraan modern di Indonesia.

Lebih lanjut, eksistensi *Civics* tidak dapat dilepaskan dari semangat pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) yang menjadi landasan utama pendidikan nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahmayanti (2023:470), bahwa paradigma baru dari Pendidikan Kewarganegaraan bertumpu pada tiga pilar keilmuan, yaitu politik, hukum, dan moral. Struktur ini berakar dari tradisi *Civics* yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam demokrasi, bukan sekadar objek kebijakan negara. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan modern tetap mengadopsi esensi *Civics* yang menekankan pada pembentukan warga negara yang kritis, partisipatif, dan berkarakter.

Dalam konteks implementasi di sekolah, hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian guru PPKn masih menjadikan nilai-nilai *Civics* klasik sebagai rujukan utama dalam pengajaran, terutama dalam hal penguatan moralitas dan kesadaran hukum siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2022: 56) bahwa

guru PPKn berperan sebagai agen utama dalam menanamkan nilai kewarganegaraan yaitu dapat melalui pendekatan humanistik dan kontekstual. Mereka tidak hanya mengajarkan teori tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk kepribadian siswa agar memiliki empati sosial dan semangat gotong royong.

Namun, tantangan muncul seiring dengan perkembangan era digital yang membawa perubahan signifikan terhadap pola pikir generasi muda. Menurut Rahayu dan Putra (2021:33), berpendapat pendidikan kewarganegaraan di era digital perlu beradaptasi dengan pendekatan berbasis literasi digital agar nilai-nilai *Civics* tetap relevan. Oleh karena itu, eksistensi *Civics* sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan harus terus diperkuat melalui inovasi pedagogis yang menyeimbangkan antara nilai-nilai klasik dan kebutuhan zaman modern.

Secara teoritik, eksistensi *Civics* sebagai basic awal dari PKN mencerminkan hubungan erat antara pendidikan, politik, dan moralitas publik. Purnomo (2020:62) juga menegaskan bahwa *Civics* tidak

hanya berperan dalam mentransfer pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif yang menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat demokratis dan beretika. Dengan demikian, revitalisasi nilai-nilai *Civics* dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi budaya.

E. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam membekali warga negara agar mampu menjalani kehidupan sebagai warga yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Eksistensi *Civics* sebagai fondasi awal dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menjadi pijakan utama dalam pembentukan karakter bangsa, karena telah meletakkan dasar yang kokoh bagi pendidikan moral, sosial, dan politik warga negara yang kemudian berkembang menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila modern. Sejak diperkenalkan pada tahun 1957,

Civics tidak hanya membahas hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan yang menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa. *Civics* atau Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam menata hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, serta membangun kesadaran hukum, menumbuhkan rasa semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan, diperlukan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, nilai moral, sikap kritis, dan keterampilan partisipatif agar peserta didik mampu berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Melalui proses pembelajaran yang berakar pada semangat *Civics*, diharapkan lahir warga negara yang cerdas secara sosial, spiritual, dan intelektual serta mampu menjalankan hak dan kewajiban dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti percaya diri, komitmen, religiusitas, moral luhur, keadilan, demokratis, dan toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, eksistensi *Civics* sebagai fondasi awal dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia

memiliki peran penting dalam membentuk arah pendidikan nasional yang berkarakter Pancasila serta menjadi dasar dalam memperkuat kesadaran demokrasi dan tanggung jawab warga negara di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Buka, Y. (2022). *Konsep Kewarganegaraan dalam Perspektif Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hendra, & Hajri. (2023). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayat, M., & Suwandi, E. (2021). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Dinamika Sosial Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial*, 9(2), 85–94.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Hanya 28,6 Persen Siswa Pahami Pancasila di Ruang Kelas*. Diakses dari <https://www2.kemendiknas.go.id/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mustika, S., & Tetep, T. (2024). Persepsi siswa terhadap pembelajaran PPKn di sekolah dalam kaitannya dengan keterampilan kewarganegaraan.

- Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(2), 145–156.
- Nanggala, A., & Damayanti, R. (2023). Civic Education dan Identitas Nasional dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 468–470.
- Nurdiansyah, M., & Dhita, R. (2024). Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Demokratis Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 33–45.
- Prasetyo, D., & Kurniawan, H. (2020). Civic Education dan Pembentukan Karakter Warga Negara di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 40–50.
- Prayogi, R., et al. (2023). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, A. (2020). Revitalisasi Civics dalam Pendidikan Kewarganegaraan Modern. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan*, 8(1), 58–65.
- Rahayu, S., & Putra, D. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital: Tantangan dan Strategi Pembelajaran. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1), 30–37.
- Rahmayanti, D. (2023). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(3), 465–472.
- Sihombing, R., & Lukitoyo, D. (2021). Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan dalam Penguatan Civic Skills Siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(3), 250–262.
- Suyato, S. (2024). Engineering the development of democratic citizenship education curriculum in the global era: A few perspectives from theoretical frameworks. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 1–15.
- SW. (2020). Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 7(2), 155–168.
- Ubaedillah, A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global*. Bandung: Alfabeta.
- Usmi, F., & Puspitaningrum, D. (2022). *Metode Penelitian Deskriptif dalam Pendidikan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widiatmaka, T. (2023). Kontekstualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(1), 457–470.
- Widodo, S. (2022). Peran Guru PPKn dalam Penguatan Karakter Siswa Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 12(2), 55–63.